

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Pustaka

#### 1. Pemberdayaan

##### a. Pengertian Pemberdayaan

Kata “pemberdayaan” dalam kajian “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti memberdayakan, cara dan proses.<sup>1</sup> Pemberdayaan berasal dari kata *power* artinya kekuasaan.<sup>2</sup> Para pakar sudah mengartikan mengenai pemberdayaan. Jika dilihat dari akar katanya, “daya” bearti memiliki daya. Daya bersinonim dengan kekuatan atau tenaga dimana hal ini berarti kata “berdaya” memiliki manai kekuatan atau tenaga.<sup>3</sup>

Berikut merupakan beragam pemaknaan mengenai pemberdayaan dalam pandangan berbagai tokoh:<sup>4</sup>

1. Shardlow dalam Adi menjelaskan bahwasannya pemberdayaan mengenai bagaimana komunitas, kelompok atau individu dalam melakukan kontrol kehidupannya sendiri dan berupaya dalam membentuk masa depan sesuai dengan harapannya.<sup>5</sup>
2. Mc. Ardle dalam Salam dan Fadhilah, lebih menitik beratkan kepada proses dalam mengambil keputusan oleh individu yang secara konsekuen menjalankan keputusan tersebut. Individu yang sudah menggapai tujuan bersama dierdayakan dengan kemandirian yang sudah dimiliki, dan menjadi keharusan untuk diberdayakan secara mandiri dengan memanfaatkan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan lain dengan tujuan mencapai tujuan yang sudah

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007). 242

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis, pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Resika Aditama, 2005) .57

<sup>3</sup> Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sidoarjo : Budi Utama, 2012). 1

<sup>4</sup> Syamsir Salam, Amir Fadhilah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008).238

<sup>5</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta : FE-UI, 2001). 33

ditentukan tanpa adanya pertolongan dan bergantung kepada hubungan eksternal.

Pemberdayaan secara istilah serupa dengan istilah pengembangan. pengembangan sumber daya manusia ialah usaha yang dijalankan untuk memperluas horizon pilihan dari masyarakat.<sup>6</sup> Pemberdayaan tersebut menekankan kemampuan orang khususnya kemampuan kelompok yang lemah, sehingga kelompok yang lebih kuat memiliki kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam kelaparan, ketidaktahuan, kesakitan yang dapat menambah pendapatan serta memperluas dalam mendapatkan jasa dan barang yang diperlukan serta ikut berperan dalam membangun dan dapat memilih keputusan yang dapat memberikan pengaruh kepada mereka.<sup>7</sup>

#### **b. Tujuan Pemberdayaan**

Pemberdayaan memiliki tujuan yang dapat memperkuat masyarakat yang lemah dengan tanpa adanya kekuatan dari sisi eksternal dan internalnya.<sup>8</sup> Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:<sup>9</sup>

1. Pengembangan dapat membantu manusia yang lemah, kaum kecil, tertindas, rakyat miskin, misalnya masyarakat miskin perkotaan, buruh tani, petani kecil, masyarakat adat terbelakang, kaum pemudat mencari pekerjaan, disabilitas dan lain sebagainya.
2. Kelompok masyarakat dapat diberdayakan secara sosioekonomis agar memiliki kemandirian dan mampu mencukupi kehidupan dan bisa turut serta dalam membangun masyarakat.

Pemberdayaan memiliki tujuan utama diantaranya membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat agar maju kearah yang baik

---

<sup>6</sup> Nani Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001). 41

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis, pembangunan Kesejahteraan Sosial*. 58

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis, pembangunan Kesejahteraan Sosial*. 60

<sup>9</sup> Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005). 115

secara kontinu.<sup>10</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha dalam memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Masyarakat akan memilih dan melihat hal yang memberikan manfaat untuk dirinya sehingga setiap usaha dalam memberdayakan masyarakat waji ditujukan demi meningkatkan martabat manusia agar menjadi masyarakat yang maju dalam beragam komponen kehidupan.<sup>11</sup>

### c. Tahap Pemberdayaan

Terdapat tujuh tahap pemberdayaan yang terdapat di masyarakat yaitu:<sup>12</sup>

1. Tahap Pesiapan  
Tahap persiapan dibagi menjadi dua yaitu: *pertama* penyimpanan petugas. Penyimpanan petugas memiliki pengertian masyarakat dengan tenaga pemberdayaan yang oleh *community woker*. *Kedua* penyimpanan lapangan yang dijalankan dengan cara non-direktif.
2. Tahap Pengkajian  
Tahap ini dijalankan secara kolektif dan individual di masyarakat. Petugas wajib berupaya dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan sumber daya masyarakat.
3. Tahap Perencanaan Alternatif kegiatan atau Program  
Tahap ini dijalankan dengan pelibatan diri petugas kedalam masyarakat dalam berpikir bagaimana mengatasi problematika yang sedang dihadapi.
4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi  
Tahap ini dilakukan dengan pemberian bantuan kepada kelompok oleh agen dalam menentukan dan merencanakan program yang akan dilakukan kedepannya sebagai bentuk mengatasipermasalahan.

---

<sup>10</sup> Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. 45

<sup>11</sup> Agus Ahmad Syafe'i, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung : Gerbang Masyarakat Baru, 2001). 39

<sup>12</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*

5. Tahap Pelaksanaan

Program pemberdayaan masyarakat akan terlaksana jika ada peran masyarakat yang diharapkan bisa mengembangkan program yang telah dibuat.

6. Tahap Evaluasi

Tahap ini dilakukan oleh petugas dan masyarakat dalam mengawasi program pemberdayaan yang dijalankan dimana program ini mestinya melibatkan masyarakat, kehadiran masyarakat ditujukan agar sistem pengawasan dibentuk dalam waktu yang relatif cepat dan meningkatkan hubungan komunikasi dalam jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam.

7. Tahap Terminasi

Tahap ini dijalankan dengan memutuskan hubungan kerja secara formal dengan masyarakat yang diberdayakan sehingga program diberhentikan.

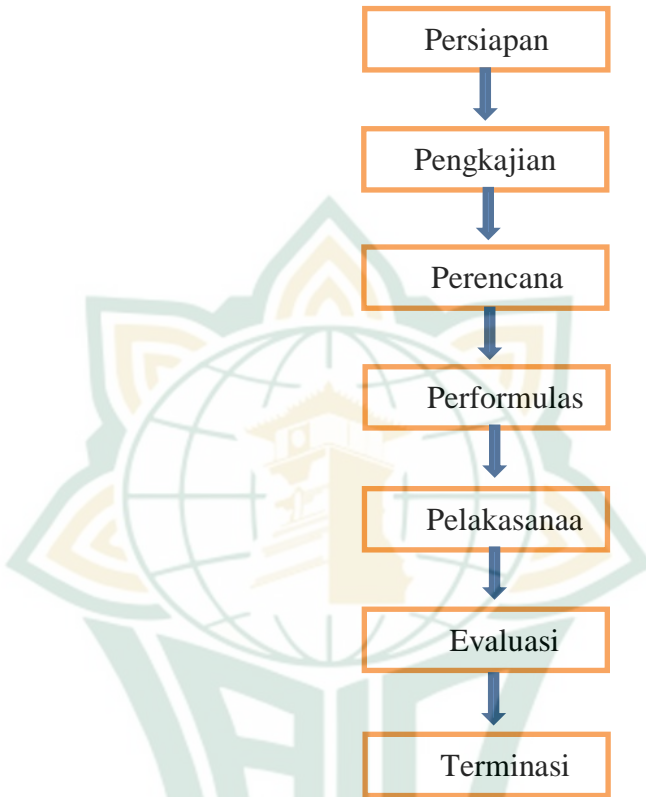
Sumohadiningrat menjelaskan bahawasannya dalam memberdayakan masyarakat terdapat tiga tahapan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Membangun iklim yang dapat menumbuhkan potensi masyarakat menjadi berkembang.
- b. Potensi masyarakat diperkuat.
- c. Kata memberdayakan memiliki arti menanggulangi.

---

<sup>13</sup> Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997).165

Gambar 2.1 Tahap Pemberdayaan



#### d. Indikator Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki tiga dimensi diantaranya: koptensi kerakyatan, sosio politik, dan partisipasi. Ada tiga indikator pemberdayaan yang mengarah pada:<sup>14</sup>

1. Aktivitas membangun yang muncul dari tumbuhnya individu dan selanjutnya berkembang menjadi perubahan besar.
2. Keadaan psikologis diketahui dengan munculnya kepercayaan diri yang bermanfaat untuk meyakinkan orang lain.
3. Pembebasan melalui gebrakan sosial yang berasal dari politisasi dan pendidikan dari masyarakat proletar, selanjutnya masyarakat proletar secara kolektif

<sup>14</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis, pembangunan Kesejahteraan Sosial*. 63

berusaha mendapatkan kekuasaan serta merubah peraturan yang menekannya.

## 2. Disabilitas

### a. Pengertian Disabilitas

Disabilitas diambil dari bahasa Inggris, “*disability*” yang mempunyai arti ketidakdayaan yang muncul sejak lahir didunia biasa dinamakan dengan “cacat permanen.”<sup>15</sup> Istilah cacat, difabel maupun disabilitas mempunyai arti sama, akan tetapi secara psikologis diterima bagi penyandang saat berinteraksi dalam lingkungan masyarakat dimana penyandang akan dilabeli dengan hal yang diskriminatif dan tidak setara. Istilah penyandang awalnya dinamakan dengan penyandang cacat kemudian kementerian sosial RI dan Komnas HAM melihat adanya makna kasar dalam istilah ini dimana maknanya tidak sesuai dengan prinsip HAM sekaligus bertolak belakang dengan nilai leluhur bangsa yang menghormati martabat manusia.<sup>16</sup>

Undang-undang mengenai penyandang disabilitas menjelaskan bahwasannya istilah disabilitas merujuk kepada individu yang memiliki keterbatasan sensorik, intelektual, mental dan fisik dalam jangka waktu yang lama atau permanen serta mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.<sup>17</sup>

Akademisi maupun warga negara mempergunakan istilah cacat dalam memaknai penyandang disabilitas. Diataranya adalah penyandang disabilitas, difabel, spesial dan berkebutuhan khusus.<sup>18</sup> Pemakaian kata memang sangat penting agar tidak menyinggung penyandang disabilitas.

---

<sup>15</sup> Muhammad Chodzirin, *Akseibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013). 17

<sup>16</sup> Tatik Mulyani, “Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Keterampilan Batik Ciprat: Sambung Roso”, *SNHRP-II: Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*, Ke 2, (2019). 53

<sup>17</sup> Tim Indepth Right PPRBN Malang, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Malang: CBM, 2016). 8

<sup>18</sup> Ledia Hanifa Amalia, *Dari Disabilitas Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016). 2

Istilah yang disukai tentunya tergantung dari disabilitas itu sendiri. Misalnya kemajemukan dalam bahasa dimana kata dipandang wajar, halus atau sopan merupakan kata yang dipandang serupa oleh yang lainnya.<sup>19</sup> Misalnya penderita tuna rungu biasanya tidak mau dipanggil dengan sebutan tuna rungu mereka beranggapan bahwa kata tuna rungu memiliki makna belas kasih dan memiliki kenyamanan untuk dipanggil dengan tuli. Sehingga, masyarakat wajib paham cara menyampaikan dengan baik dan tidak menyinggung orang.

#### **b. Ciri-ciri Penyandang Disabilitas**

Menurut Undang-undang Dasar Nomer 4 Tahun 1997 mengenai penyandang disabilitas menyebutkan bhawasannya terdapat berbagai ciri difabel atau kecacatan dalam kategorinya yaitu.<sup>20</sup>

##### **1. Cacat Fisik**

Cacat fisik merupakan cacat yang disebabkan oleh gangguan fungsi tubuh, diantaranya, kemampuan bicara, pendengaran, penglihatan dan gerakan tubuh.

Kriteria kecacatan tersebut adalah:

- a. Cacat pembawaan,
- b. Cacat rasa
- c. Cacat wicara
- d. Cacat rungu
- e. Cacat netra
- f. Cacat leher
- g. Cacat tangan
- h. Cacat punggung
- i. Cacat kaki

Istilah dalam cacat tubuh lebih dari satu diantaranya tunanetra. Kata ini diambil dari kata yuna dengan artian kurang atau rugi dan netra yang memiliki arti penglihatan. Jadi tunanetra ditunjukkan bagi mereka yang memiliki tubuh yang kurang sempurna.

---

<sup>19</sup> Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offst, 1997). 136

<sup>20</sup> Argyo Demartoto, *Menyibak Sensivitas Gender Dalam Keluarga Difabel* , (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005). 10-11

2. Cacat mental

Merupakan kecacatan pada tingkahlaku atau mental baik cacat dari lahir ataupun disebabkan oleh penyakit, diantaranya

- a. Gangguan epilepsi atau mental organik.
- b. Alkoholisme
- c. Gangguan psikiatik fungsional
- d. Retadasi mental

3. Cacat mental dan fisik (cacat ganda)

Cacat ganda merupakan keadaan individu yang mengalami dua bentuk kecacatan secara bersamaan dan hal ini akan memberi gangguan pada penderitanya.

**c. Karakteristik Kecacatan**

Penyandang disabilitas memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan keadaan fisik. Ciri khas ini menjadi pertimbangan guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran yang diberikan. Karakteristik kecacatan diantaranya yaitu:<sup>21</sup>

1. Tunanetra

Nama lain dari keadaan ini ialah kebutaan atau gangguan penglihatan total ataupun sebagian. Akurasi penglihatannya kurang dari 6/60 ataupun tidak dapat melihat dengan jelas. Tunanetra terbagi kedalam dua bentuk yaitu lemah penglihatan dan buta total.

2. Tunarungu

Tuna rungu adalah gangguan pendengaran baik gangguan permanen ataupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengarannya adalah sebagai berikut:

- a. Tuli (diatas 90db)
- b. Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40db)
- c. Gangguan pendengaran ringan (41-55db)
- d. Gangguan pendengaran sedang (56-70db)
- e. Gangguan pendengaran berat (71-90db)

---

<sup>21</sup> Muhammad Chodzirin, *Akseibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*. 20



### 3. Tunadaksa

Ialah gangguan pada gerakan yang dikarenakan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang karena kecelakaan, sakit dan bawaan. Termasuk *cebral palsy*, amputansi, lumpuh dan polio. Gangguan ini memiliki beberapa tingkatan yaitu:

- a. Ringan : ketika aktivitas fisiknya terbatas namun bisa diatasi dengan melakukan terapi.
- b. Gangguan sedang: ketika motoriknya memiliki keterbatasan dan adanya gangguan koordinasi sensorik.
- c. Gangguan berat: ketika gerak fisik sudah tidak dapat dikontrol lagi.

### 4. Tunagrahita

Tunagrahita adalah seseorang yang intelegensinya di bawah rata-rata dan dibarengi dengan ketidakmampuan berperilaku sesuai dengan taraf usianya dalam perkembangan. Terdapat keterbatasan dalam bersosialisasi dan mengendalikan diri bagi anak yang menderita tunagrahita.

Terdapat dua bagian utama yang menjadi ciri anak tunagrahita yaitu:

- a. Fungsi intelektual, yaitu seseorang dengan kesulitan belajar baik ketika berkomunikasi atau memahami materi.
- b. Perilaku adaptif, yaitu ketika seseorang tidak mampu dalam bersosialisasi dan mengurus dirinya sendiri.

### 5. Tunalaras

Tunalaras yaitu seseorang dengan gangguan dalam kontrol sosial atau pengendalian emosi. Tunalaras disebabkan faktor eksternal dan internal.

## 3. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

### a. Pengertian UMKM

UMKM ialah kegiatan ekonomi skala kecil yang dilakukan rakyat dan memenuhi kriteria bersih atau hasil penjualan tahunan serta aturan kepemilikannya diatur dalam UU.<sup>22</sup> Usaha mikro kecil dan menengah

---

<sup>22</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). 1

yang disingkat UMKM merupakan istilah yang berlandaskan badan usaha dengan keuntungan tahunan kurang dari 200 juta Rupiah dari sudut pandang pemilik usaha, UMKM digambarkan sebagai usaha bisnis yang dijalankan badan usaha kecil, rumah tangga dan individu yang bukan dari kalangan atas namun menengah kebawah.<sup>23</sup> Usaha kecil dapat di definisikan sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Mengembangkan empat ekonomi utama atau “*core business*” sebagai motor penggerak pembangunan yaitu bisnis kelautan, manufaktur SDM, industri dan agribisnis.
2. Mengembangkan lokasi andalan guna meningkatkan percepatan pemulihan perekonomian dengan pendekatan daerah atau wilayah, yaitu dengan pemulihan daerah atau wilayah untuk menampung program utama dan mengembangkan beragam potensi dan sektor.
3. Meningkatkan usaha dalam memberdayakan masyarakat.

UU RI NO 20 Tahun 2008 mengenai UMKM didalam pasal 1 dinyatakan bahwasannya “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.”<sup>25</sup> Sedangkan “usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>23</sup> Dewi Suryani Purba, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, ( Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021). 5

<sup>24</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. 1

<sup>25</sup> Kadeni, Ninik Srijani, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” *EQUILIBRIUM*, 8 No. 2, (2020). 193

Undang undang.”<sup>26</sup> Untuk “usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.”<sup>27</sup>

**b. Manfaat UMKM**

UMKM atau “Usaha Mikro Kecil dan Menengah” merupakan istilah yang berlandaskan badan usaha dengan keuntungan tahunan kurang dari 200 juta Rupiah dari sudut pandang pemilik usaha, UMKM digambarkan menjadi usaha bisnis yang dilakukan oleh badan usaha kecil, rumah tangga atau individu yang bukan dari kalangan atas namun menengah kebawah.<sup>28</sup> Berikut ini merupakan manfaat dari UMKM antara lain.<sup>29</sup>

1. Penyumbang produk domestik terbesar  
Sektor UMKM mampu memberikan peningkatan pada produk dalam negeri yang dihasilkan. Pasar yang disasar tidak hanya nasional bahkan sampai pada taraf internasional dimana tidak sedikit produk lokal yang diminati. Misalnya produk kerajinan asli Indonesia yang tidak sedikit tembus sampai mancanegara.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan  
UMKM membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur. Dalam hal ini pemerintah menjadi terbantu mengurangi jumlah pengangguran
3. Solusi masyarakat kelas menengah  
Modal yang dibutuhkan dalam membuka usaha mudah atau tidak susah. Banyak bantuan yang

---

<sup>26</sup> Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*.6

<sup>27</sup> Ferry Duwi Kurniawan, Luluk Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan kemiskinan”*JKMP*, 2 No.2 (2014). 169

<sup>28</sup> Dewi Suryani Purba, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. 5

<sup>29</sup> Kadeni, Ninik Sriyani, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 193

diberikan oleh lembaga pemerintahan dengan jumlah kredit yang kecil. Bank juga memberi pinjaman modal modal terhadap pengusaha-pengusaha

4. Operasional yang fleksibel

Struktur organisasi UMKM sederhana. Setiap pemimpin memiliki tanggungjawab masing-masing. Tidak hanya itu biasanya UMKM lebih mementingkan tren konsumen yang saat ini berkembang.

**c. Klasifikasi UMKM**

Dalam perpektif perkembangannya, UMKM dapat diklarifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:<sup>30</sup>

1. *Livelihood Activities*

*Livelihood Activities* adalah UMKM yang memberikan peluang bekerja guna mendapatkan penghasilan yang lebih umum biasanya disektor informal misalnya pedang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*

*Micro Enterprise* merupakan UMKM yang mempunyai eragam sifat pengrajin, namun belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dinamic Enterprise*

*Small Dinamic Enterprise* ialah UMKM yang sudah erjiwa kewirausahaan dan memiliki kemampuan dalam menerima pesanan ekspor atau subkontrak.

4. *Fast Moving Enterprise*

*Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang sudah berjiwa kewirausahaan dan pelaku usaha akan mengembangkan atau mentransformasikan usahanya menjadi skala besar.

**d. Ciri-ciri UMKM**

Terdapat beberapa ciri-ciri pada UMKM yaitu:<sup>31</sup>

1. Jenis komoditas yang dijalankan tidaak tepat dan dapat berganti.
2. Lokasi untuk berusaha bisa berpindah sewaktu-waktu.

---

<sup>30</sup> Kadeni, Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 194

<sup>31</sup> Kadeni, Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 194

3. Belum adanya aktivitas administrasi dalam pelaksanaan usaha meskipun beberapa sudah ada yang menjalankannya dan seringnya tidak adanya pembedaan keuangan usaha dan pribadi.
4. Sumberdaya manusia di dalamnya belum memiliki jiwa wirusaha yang mempuni
5. Kebanyakan pelaku UMKM tingkat pendidikanya masih rendah
6. Kebanyakan dari pelaku UMKM belum memiliki jaringan perbankan, meskipun ada beberapa yang sudah
7. Dominasi UMKM belum memiliki legalitas seperti NPWP

**e. Kelebihan dan Kekurangan UMKM**

Terdapat beberapa kelebihan yang ada dalam UMKM yaitu.<sup>32</sup>

1. UMKM memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja sebesar 50% tenaga kerja yang ada.
2. UMKM memiliki kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja baru yang bisa memajukan dan mengembangkan wirausahawan baru.
3. Memiliki segmentasi pasar yang uink, menggunakan manajemen yang fleksibel dan sederhana dari perubahan pasar.
4. Memiliki kemampuan untuk memperdayakan SDA yang terdapat disekitar lingkungan dan sebagiannya memiliki kemampuan dalam pemanfaatan hasil indsutri atau limbah.
5. Berpotensi mengalami perkembangan.

Kelemahan dari UMKM juga seringkali menjadi faktor penghamabat dari usaha mikro diantaranya:

1. Masih terbatasnya sumberdaya manusia
2. Keterbatasan pemasaran produk karena pengusaha lebih mengedepankan prodksi daipada pemasaran, terlebih kurangnya pengetahuan mengenai akses informasi dan berakibat pada dominasi hanya menjadi tukang.
3. Konsumen cenderung tidak mempunyai produk industri kecil

---

<sup>32</sup> Kadeni, Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 195-196

4. Masalah permodalan juga sering menjadi hambatan UMKM dimana modal yang digunakan milik sendiri yang relatif kecil. Dalam menyelesaikan permasalahan sering tidak tepat sasaran karena kurang melakukan monitoring dan pelaksanaan program yang tumpang tindih.

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian pendahuluan yang sudah pernah dijalankan oleh peneliti lain yang memiliki pembahasan yang serupa dengan penelitian ini yaitu:

1. *“Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.”*<sup>33</sup> Peneliti ini membahas mengenai “peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan berfokus pada teori peran dari im dan Frank Tesoriero.”

Hasil dari penelitian menunjukkan. *Pertama*, Peran Fasilitatif, berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti di lapangan pemberdayaan masyarakat disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas sosial sudah berjalan sesuai program, namun program pemberdayaan tersebut hanya sebatas pemberian paket bantuan sosial. *Kedua*, peran Edukasi, proses pelatihan dan pembinaan mental disabilitas di adakan selama tiga hari dan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi disabilitas dinas sosial bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu pemerintah kota manado. Dalam pemberian edukasi dari Dinas Sosial untuk meningkatkan potensi disabilitas sudah cukup baik tetapi belum maksimal hal ini dikarenakan setelah proses pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi produktif sudah tidak ada pemantauan atau bimbingan lanjut dalam pengembangan usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial. *Ketiga*, peran teknis, peran Dinas Sosial dalam pengumpulan data disabilitas masih belum maksimal hal ini dikarenakan data jumlah keseluruhan disabilitas setiap tahun dari Dinas Sosial belum mempunyai data terbaru hal ini

---

<sup>33</sup> Theresia Baturangka, “Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas; *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, 3, No. 3 (2019). 3-4

dapat berpengaruh dalam proses pemberdayaan secara merata untuk disabilitas di Kota Manado.

2. *“Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”*,<sup>34</sup>.

Hasil penelitiannya yaitu Program pemberdayaan Disabilitas Oleh Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat kepada penyandang disabilitas berjalan cukup baik, diantara programnya adalah : *pertama* memasak, yaitu pelatihan yang disajikan kepada penyandang tuna rungu yang erkeinginan memiliki keterampilan untuk membuka usaha makanan. *Kedua* menjahit, jenis keterampilan ini diperuntukan bagi Tunadaksa dan tuna wiacara yang berkeinginan membuka usaha menjahit. *Ketiga* pembengkelan atau montir, jenis keterampilan ini diperuntukan bagi Tunadaksa dan tuna wiacara yang berminat untuk membuka usaha bengkel. *Keempat* elektronika yang dijalankan dengan memberikan praktik dan materi. *Kelima* memijat, pelaksanaan pelatihan ini meliputi pemberian materi dan praktek. Keenam, percetakan atau sablon berupa pengetahuan mengenai pelatihan sablon berkenaan dengan alat, bahan dan cara menggunakannya.

Peran pemerintah ini hanya sebagai pemberi modal saja sedang untuk pelaksanaanya di serahkan ke Dinas Sosial. Jadi, apabila difabel mengalami masalah modal dan alat-alat kerja pemerintah dan Dinas Sosial siap memberikan bantuan. Dalam pelatihan yang telah disajikan dimanaa terdapat beberapa kegagalan didalamnya dimana difabel kurang terampil dimana sampai pelatihan berakhir masih dibutuhkan bimbingan lanjutan untuk difabel.

3. *“Pemberdayaan Kewirausahaan Basis Teknologi Informasi bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul”*,<sup>35</sup>.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya dampak yang baik setelah dijalankannya pelatihan. Peserta pelatihan memiliki

---

<sup>34</sup> Siti Aesah,dkk “Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Manajemen*, 14, No.2, (2020). 216

<sup>35</sup> Nurul Syobah, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kalimantan Timur” *Nuansa*, 15, No. 2 , (2018). 265

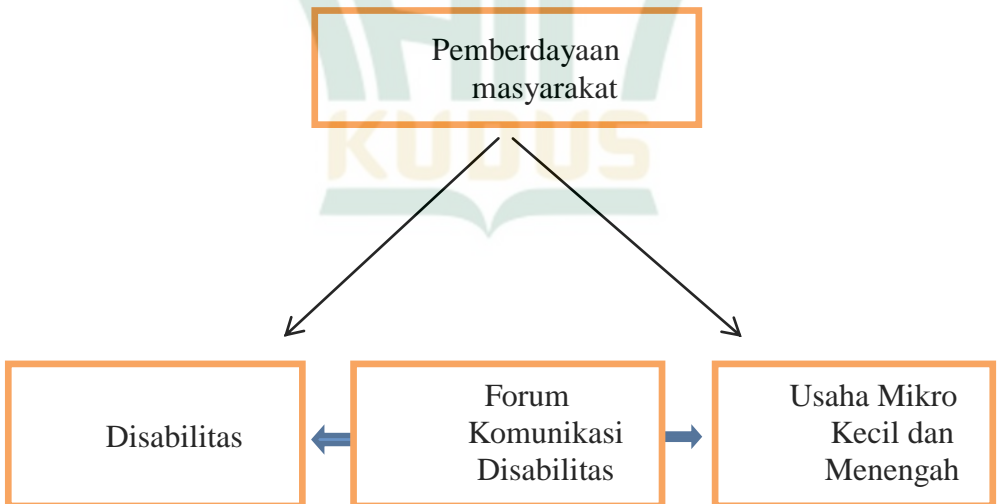
peningkatan kemampuan dalam berjualan online dengan indikator yang diketahui adalah adanya aktivitas yang terjadi di halaman facebook. Pengetahuan peserta pelatihan diharapkan berdampak pada kemampuan berwirausaha bagi anggota disabilitas Mitra Sejahtera.

### C. Kerangka Berfikir

Ketika hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara baik dalam bentuk teoritik, maka kerangka berpikir ini dinyatakan sebagai kerangka pemikiran yang baik. Variabel yang dijelaskan merupakan keterkaitan diantara variabel dependen dan independen. Ketika variabel yang dijelaskan dua ataupun lebih, maka diharuskan menyajikan kerangka berpikir yang nantinya akan menghasilkan hipotesis yang bentuknya bisa huungan ataupun komparasi. Peneliti wajib memahami beragam teori yang menjadi argumentasi dasar dalam melakukan penyusunan kernagka berpikir dan pada akhirnya mendapatkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini menjadi penjelasan sementara prihal gejala dalam ojek problematika.<sup>36</sup> .

Kerangka berpikir pada penelitian ini secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka berpikir



<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 47